

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM
MENINGKATKAN PENGELOLAAN PIUTANG
SECARA EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

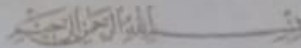
**NAMA : SUCI SAFITRI SARAGIH
NPM : 1505170143
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SUCTSAFITRI SARAGIH
N P M : 1505170143
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PIUTANG SECARA EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ZULIAHANUM, S.E., M.SI)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M)

Pemertimbang

(HENNY ZERICA LUBIS, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua



(IL JANUR, S.E., M.M., M.SI)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.SI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SUCI SAFITRI SARAGIH
N P M : 1505170143
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM
MENINGKATKAN PENGELOLAAN PIUTANG SECARA
EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si.)

Diketahui/Disetujui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE., M.M., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Safitri Saragih
NPM : 1505170143
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG
DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN
PIUTANG SECARA EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTRA III (PERSERO) MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan


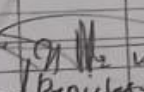
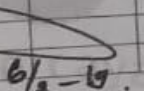


SUCI SAFITRI SARAGIH

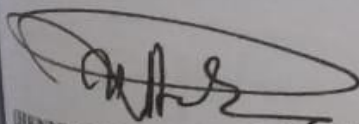
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

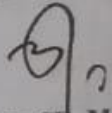
Nama Lengkap : SUCI SAFITRI SARAGIH
 N.P.M : 1505170143
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
 Judul Penelitian : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PIUTANG SECARA EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Deskripsi Data dalam Bab II Jelaskan tentang, - piutang pd Mitra - Rincian piutang dan jumlah Mitra 		10/02-2019
	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Jelaskan latar belakang SPI yang dibuat di Liti perusahaan. ✗ Pembahasan lebih dikembangkan lagi yang berkaitan dgn masalah yang diteliti. ✗ lampirkan syarat perusahaan Smilex organik. ✗ Pembahasan parta pengembangan/produk ✗ kesimpulan dan saran perbaikan ✗ Abstract perbaikan ✗ pendahuluan proposal/skripsi perbaikan dgn telit 		15/02-19
	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Ace. Skripsi 		6/3-19

Pembimbing Skripsi


BENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si

Medan, Februari 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi


(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SUCI SAFITRI SARAGIH
 N.P.M : 1505170143
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
 Judul Penelitian : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM
 MENINGKATKAN PENGELOLAAN PIUTANG SECARA
 EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
 MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	- Identifikasi Masalah penelitian - Diketahui teori dan sub teori		8/12-18.
	- Rumusan Masalah - Tujuan penelitian - Alasan bimbingan penelitian - Judul penelitian		12/12-18.
	- Teknik Analisis Data - Daftar pustaka - Pertanyaan penelitian proposal		31/12-18.
	Acc. proposal		31/12-18.

Medan, Desember 2018

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Pembimbing Proposal

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

ABSTRAK

SUCI SAFITRI SARAGIH, NPM 1505170143, ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PIUTANG SECARA EFEKTIF DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN, SKRIPSI 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif yaitu dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dan dibandingkan dengan literatur serta dianalisa kemudian diuraikan secara rinci untuk mencari penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari objek penelitian di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian intern piutang belum dapat meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan hal ini bisa dilihat dari komponen penilaian risiko yaitu masih adanya mitra binaan yang kurang mampu dalam membayar pinjaman/modal kerja kepada perusahaan, masih belum efektifnya pada komponen aktivitas pengendalian yaitu dengan adanya rangkap tugas, dan masih terdapatnya peningkatan kembali piutang tak tertagih pada tahun 2016 dan 2017 yang menjadi tanggungjawab divisi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pengawasan di PT. Perkebunan Nusantara III (Pesero) Medan masih belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Piutang Usaha.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Pengendalian Intern Piutang Dalam Meningkatkan Pengelolaan Piutang Secara Efektif Di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan bimbingannya. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Ayah dan Mama tercinta dengan penuh kasih sayang yang telah dicurahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE., MM., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Hasrudy Tanjung, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Henny Zurika Lubis, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si., selaku Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen Ekonomi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Bapak pimpinan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan beserta seluruh staff pegawai dan karyawan yang telah membantu penulisan dalam penyediaan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
12. Kepada seluruh teman-teman khususnya stambuk 2015 jurusan Akuntansi Kelas C Pagi yang telah memberikan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi kelengkapan Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

Medan, Maret 2019

Penulis

SUCI SAFITRI SARAGIH
1505170143

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
1. Batasan Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Sistem.....	8
a. Pengertian Sistem	8
2. Pengendalian Intern.....	9
a. Pengertian Pengendalian Intern	9
b. Tujuan Pengendalian Intern.....	11
c. Komponen Pengendalian Intern	14
d. Unsur-unsur Pengendalian Intern.....	19
e. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	22

f. Keterbatasan Pengendalian Intern.....	23
g. Pendekatan terhadap Pengurangan Resiko Pengendalian Intern.....	25
3. Pengertian Piutang	26
a. Pengertian Piutang.....	26
b. Klasifikasi Piutang	28
c. Metode Pencatatan Piutang	29
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Piutang.....	29
e. Cadangan Kerugian Piutang	30
4. Sistem Pengendalian Intern Piutang	31
a. Prinsip Pengendalian Internal atas Penagihan Piutang.....	31
b. Prosedur Penagihan Piutang.....	32
c. Fungsi Yang Terkait Dalam Penagihan Piutang.....	35
d. Dokumen Yang Terkait.....	36
e. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas dari Piutang.....	36
5. Penelitian Terdahulu	39
B. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Definisi Operasional	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskriptif Data	51
1. Piutang Pinjaman Mitra Binaan.....	51

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Modal Kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	53
1) Tahap Pendahuluan.....	53
2) Prosedur Penagihan Piutang	54
3) Prosedur Pencatatan Piutang	54
4) Pengelolaan Piutang Secara Efektif.....	55
3. Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.....	56
B. Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Piutang Mitra Binaan PTPN III (Persero) Medan	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara.....	46
Tabel III.2 Waktu Penelitian.....	47
Tabel IV.1 Data Piutang Pinjaman Mitra Binaan PTPN III (Persero) Medan	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Prosedur Penagihan Piutang.....	33
Gambar II.2 Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang.....	38
Gambar II.3 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar IV.2 Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan berbagai persoalan yang ditimbulkan, maka pembenahan di segala bidang usaha perlu dilakukan. Semua kegiatan operasional yang ada pada perusahaan mempunyai suatu standar atau prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang optimal. Pada perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau jasa keuangan, fokus utama perusahaan adalah melakukan pemberian kredit secara tepat kepada konsumen. Setiap timbul piutang maka perusahaan perlu melakukan penagihan. Dalam hal ini, penggunaan suatu sistem sangat diperlukan untuk memudahkan prosedur penagihan serta untuk memberikan informasi yang akurat. Sistem merupakan salah satu bentuk dari pengendalian piutang. Pengendalian piutang merupakan salah satu aspek dari pengendalian intern yang harus memiliki prioritas penting terutama pada perusahaan jasa keuangan. Pengendalian intern piutang yang baik akan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dengan efisien. Apabila pengendalian intern terhadap piutang dapat berjalan dengan baik, maka untuk mencapai tujuan perusahaan secara umum dan secara khusus memberikan pencapaian pada tiga golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (IAPI, 2011, hal. 319.2).

Piutang usaha sebuah perusahaan pembiayaan atau jasa keuangan merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar serta menjadi salah satu bagian yang cukup besar dari total aktiva perusahaan. Menurut Iwan Setiawan (2010, hal. 199) Piutang usaha merupakan salah satu unsur terpenting dalam aktiva lancar karena biasanya hanya membutuhkan satu tahapan lagi untuk dikonversi menjadi kas. Oleh karena itu, pengendalian intern piutang ini sangat penting diterapkan. Kecurangan dalam suatu siklus kerja sangat mungkin terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan.

Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran pada debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan salah satu BUMN yang melakukan program usaha kemitraan untuk mendukung usaha utamanya yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Defersifikasi usaha dan pendirian program kemitraan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat

dan koperasi berskala kecil. Dimana program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi layak kredit dan mandiri. Usaha kecil yang menerima pinjaman dari program kemitraan biasanya disebut dengan mitra binaan. Program kemitraan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah mulai dilaksanakan pada tahun 1992 sampai pada tahun 2017 dengan dana bergulir yang telah disalurkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah Rp. 254.723.552.113 kepada 7.681 UKM.

Dimana di dalam kegiatannya perusahaan masih belum mengelola dengan baik piutangnya, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang ada pada perusahaan berikut:

Tabel I.1
Data Piutang Pinjaman Mitra Binaan PTPN III (Persero) Medan
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Piutang	Jumlah Piutang Tak Tertagih	Persentase Piutang Tak Tertagih
2013	72.321.336.813	31.341.415.696	43,34%
2014	73.928.448.315	32.358.558.504	43,77%
2015	61.564.544.380	5.267.304.566	8,56%
2016	70.898.390.444	13.890.150.575	19,60%
2017	73.127.959.431	15.907.294.000	21,75%

Sumber Data PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah piutang tak tertagih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 piutang tak tertagih mengalami kenaikan kembali, keadaan ini menggambarkan perusahaan dalam melakukan pengendalian intern piutang belum memenuhi standar SPI yang dikemukakan oleh Bodnar (2008, hal. 236) yang mengatakan bahwa perlu

adanya penafsiran risiko dalam pengendalian sehingga manajemen perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat meminimalisasikan kegagalan. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan mitra binaan dalam membayar piutang dengan segera sehingga menyebabkan tagihan piutang belum tertagih.

Untuk mencegah terjadinya risiko dalam piutang maka perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian internal atas piutang. Menurut Bodnar (2008, hal. 233) menyatakan bahwa “Pengendalian intern adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan.”

Dengan adanya peningkatan piutang tak tertagih maka tujuan sistem pengendalian intern yang tidak tercapai yaitu mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat pelepasan, penyalahgunaan kesalahan pengelolaan, kekeliruan dan kecurangan, serta membuat data keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat.

Menurut Warren Reeve Fess (2005, hal. 407) yang menyatakan bahwa

“Apabila jumlah piutang yang semakin meningkat memberikan tantangan bagi perusahaan untuk dapat mengelola piutang dengan efektif. Karena jika terlalu besar jumlah saldo piutang tak tertagih ataupun jumlah saldo piutang ragu-ragu tidak efektifnya pengendalian terhadap manajer yang memutuskan kredit atau tidak efektifnya pengendalian bagian piutang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.”

Untuk terlaksananya pengendalian intern dan administrasi yang baik dan efektif, diperlukan desain sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik

agar pelaksanaan prosedur dan kinerja diperusahaan dapat berjalan dengan baik dan memadai.

Menurut Mulyadi (2016, hal. 131) menyatakan bahwa “pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.”

Fenomena yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu masih adanya penggabungan fungsi piutang juga melaksanakan wewenang dan tanggung jawab fungsi penagihan, fungsi akuntansi juga melaksanakan wewenang dan tanggung jawab fungsi penerimaan kas. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa menurut COSO (Bodnar, 2008, hal. 239) bahwa pemisahan tugas yang dimaksud adalah pemisahan pembagian kerja. Maksudnya ialah pekerjaan yang berbeda harus dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. Adanya rangkap fungsi tugas di dalam perusahaan dapat menimbulkan kecurangan yang mengakibatkan perusahaan rugi.

Dari fenomena di atas apabila dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal yang memiliki lima komponen dimana setiap komponennya berkaitan menurut COSO, maka komponen aktivitas pengendaliannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Pentingnya pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan piutang usaha sehingga resiko atas piutang tak tertagih atau kecurangan yang bisa dilakukan karyawan dapat diminimalisirkan, agar manfaat yang diperoleh perusahaan dimasa depan sebesar jumlah yang diharapkan. Sehubungan dengan masalah piutang pada

perusahaan maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk yang berjudul **“Analisis Pengendalian Intern Piutang Dalam Meningkatkan Pengelolaan Piutang Secara Efektif Di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu:

1. Adanya peningkatan jumlah piutang tak tertagih pada tahun 2017.
2. Adanya mitra binaan yang kurang mampu dalam membayar pinjaman/modal kerja kepada perusahaan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaian tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini dibatasi yaitu pada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan untuk tahun yang diteliti dari tahun 2013-2017.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah pengendalian intern piutang dapat meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengendalian intern piutang dapat meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan analisis pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

b. Bagi Perusahaan.

Manfaat praktisi dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada instansi yang diteliti khususnya mengenai pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bahan pembandingan peneliti lain yang berkaitan dengan masalah ini dan untuk menambah referensi serta acuan mahasiswa lain dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia, sistem berasal dari dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema*, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Azhar Susanto (2013, hal. 22) pengertian sistem sebagai berikut: “Sistem adalah kumpulan/group dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk msencapai satu tujuan tertentu.”

Menurut Sutarman (2009, hal. 5), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi: “sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.”

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011, hal. 1) pengertian sistem adalah sebagai berikut: “suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu.”

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah prosedur-prosedur/komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan suatu proses/kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Intern

Pada dasarnya setiap pelaku bisnis “yang baik” dari masa ke masa pasti memiliki kesadaran akan pentingnya “pengendalian intern” agar dapat sejalan dengan tujuan bisnis itu dan siap menghadapi peluang dan tantangan diluar institusi maupun di waktu mendatang. Namun pada umumnya, para pebisnis menerjemahkan pengendalian intern dalam perspektif yang berbeda-beda. Pengendalian intern biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi/bisnis perusahaan.

Pengendalian intern merupakan salah satu fungsi pihak manajemen. Pada umumnya, perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik.

Menurut Hery (2013, hal. 159) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Menurut Valery G. Kumaat (2011, hal. 15) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).”

Sedangkan menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Treadway Commission* (komisi nasional Amerika untuk penyelewengan laporan keuangan) (Azhar Susanto, 2013, hal. 95) adalah sebagai berikut:

“pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan

penyelewengan. Dengan kata lain pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk meyakinkan apakah kegiatan operasional tersebut telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perusahaan.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Bahkan tidak hanya dari segi operasional saja yang akan dapat berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik.

b. Tujuan Pengendalian Intern

COSO (2013, hal. 3) dalam *framework* terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

“The Framework provides for three categories of objectivities, which allow organization to focus on differing aspects of internal control:

- 1. Operations Objectives – These pertain to effectiveness and efficiency of the entity’s operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
- 2. Reporting Objectivities – These pertain to internal and external financial and non – financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity’s policies.*
- 3. Compliance Objectives – These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.*

Menurut Hery (2013, hal. 160), tujuan pengendalian intern tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

Menurut Al Haryono Jusup (2014, hal. 356-357), sistem pengendalian internal dirancang oleh manajemen untuk memenuhi tiga tujuan utama:

1. Keandalan pelaporan keuangan entitas.
Manajemen bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pihak-pihak lainnya. Manajemen memiliki tanggungjawab hukum dan professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi entitas.
Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan perusahaan. Tujuan utama pengendalian ini adalah untuk memberi informasi keuangan dan non-keuangan yang

akurat tentang kegiatan operasional perusahaan untuk pengambilan keputusan.

3. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan.

Perusahaan publik, non-publik, dan organisasi nirlaba berkewajiban menaati banyaknya undang-undang dan peraturan-peraturan yang terbitkan. Sebagian diantaranya hanya menyangkut akuntansi secara tak langsung, namun ada juga yang langsung, namun ada juga yang langsung berkaitan dengan akuntansi.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan dan tujuan-tujuan ketaatan.

Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset dari kerugian. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat-pembuat standar yang diakui, ataupun kebijakan-kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan mana entitas merupakan subjeknya.

c. **Komponen Pengendalian Intern**

Sejalan dengan waktu, semakin didasari adanya berbagai faktor yang masih perlu diartikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada *historical/current* data, dan kelemahan-kelemahan komunikasi internal.

Struktur pengendalian intern mencakup lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian intern dapat dipenuhi. Adapun komponen-komponen dan unsur pengendalian intern COSO yang diungkapkan oleh Bodnar (2008, hal. 235) yaitu:

1. "Lingkungan Pengendalian

Pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

Faktor-faktor lingkungan pengendalian:

1) Integritas dan nilai-nilai.

Integritas dan nilai-nilai adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis. Termasuk juga komunikasi standar nilai dari perilaku perusahaan kepada pegawai melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanaan dan melalui contoh-contoh.

2) Komitmen terhadap kompetensi.

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan.

- 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit.
Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dan atau komite tersebut kepada manajemen dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.
- 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen.
Karakteristik ini dapat meliputi antara lain pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha, sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.
- 5) Struktur Organisasi.
Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.
- 6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab.
Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.
- 7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pekerjaan, orientasi, pelatihan dan evaluasi.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran Risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian analisis dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.
- 2) Personel baru
Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda atas pemahaman terhadap pengendalian intern.
- 3) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian intern.
- 4) Pertumbuhan yang pesat.
Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian risiko kegagalan dalam pengendalian.
- 5) Teknologi baru
Pemasangan teknologi baru ke dalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern.
- 6) Lini produk, produk atau aktivitas baru.
Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- 7) Restrukturisasi korporat.
Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- 8) Operasi luar negeri.
Perluasan atau perolehan operasi luar negeri membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unik yang berdampak

terhadap pengendalian intern, seperti resiko yang berubah dari mata uang asing.

9) Penerbitan standar akuntansi baru.

Pemakaian prinsip akuntansi baru atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap resiko dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan:

1) Review kerja.

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perkiraan atau kinerja periode sebelumnya dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas.

2) Pengelolaan informasi.

Dikelompokan atas luas aktivitas pengendalian, yaitu pengendalian umum (*general control*) berupa pengendalian atas pusat data pemrolean dan pemeliharaan perangkat lunak, sistem keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *mini computer* dan lingkungan pemakai akhir (*end user*).

3) Pengendalian fisik.

Aktivitas ini mencakup keamanan aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap akibat dan catatan otoritas untuk akses ke program computer dan data *files* dan perhitungan secara periodik dan pembagian dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendalian.

4) Pemisahan tugas.

Pembenanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan

kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
- 2) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
- 3) Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehinggamemungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
- 4) Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
- 5) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggungjawab individual berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi. Pembukaan saran komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindak lanjuti.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi, pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau suatu kombinasi diantara keduanya.”

d. Unsur-unsur Pengendalian Internal

COSO (2013, hal. 4) menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal control consists of five integrated components:

- 1. Control Environment*
- 2. Risk Assessment*
- 3. Control Activities*
- 4. Information and Communication*
- 5. Monitoring Activities”*

Standar audit (SA 315.A51) sebagaimana dikutip oleh Al Haryono Jusup (2014, hal. 363-374) membagi pengendalian intern ke dalam lima komponen yang masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

1. “Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup fungsi tata kelola dan manajemen atas pengendalian internal entitas dan pentingnya pengendalian tersebut dalam entitas. Lingkungan pengendalian menetapkan arah organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian personel organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang mencerminkan perilaku menyeluruh manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas. Lingkungan pengendalian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Komunikasi dan penegakan nilai integritas serta etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Partisipasi oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola;
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
- e. Struktur organisasi;
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab;
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Proses Penilaian Risiko Entitas

Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan manajemen berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Proses penilaian risiko entitas membentuk suatu basis bagi manajemen untuk menentukan bagaimana risiko dikelola. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku, mengestimasi signifikansi risiko bisnis tersebut, menilai kemungkinan keterjadiannya, dan memutuskan tindakan untuk merespons dan mengelola risiko tersebut beserta hasil proses penilaian risiko tersebut.

- ## 3. Sistem Informasi yang Relevan dengan Pelaporan Keuangan
- Suatu sistem informasi terdiri dari infrastruktur (komponen fisik dan perangkat keras), perangkat lunak, orang, prosedur, dan data. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan mencakup metode dan catatan yang:
- a. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang valid;
 - b. Mendeskripsikan transaksi secara cukup terperinci dan tepat waktu untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan;
 - c. Mengukur nilai transaksi dengan suatu cara yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut secara tepat dalam laporan keuangan;
 - d. Menentukan periode terjadinya transaksi yang memungkinkan pencatatan transaksi tersebut dalam periode akuntansi yang tepat;
 - e. Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait secara tepat dalam laporan keuangan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilakukan untuk menghadapi risiko guna tercapainya tujuan entitas. Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan suatu audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelaahan kinerja;
- b. Pengolahan informasi;
- c. Pengendalian fisik;
- d. Pemisahan tugas melibatkan penilaian efektivitas pengendalian secara berkala dan tepat waktu serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan pengendalian mencakup pertimbangan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dan pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana diperlukan sehubungan dengan perubahan dalam kondisi. Pemantauan juga dilakukan untuk menjamin bahwa pengendalian beroperasi secara efektif secara berkelanjutan sepanjang waktu.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal yang harus ada di dalam suatu perusahaan terdiri dari lima komponen. Komponen-komponen pengendalian internal ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya penilaian risiko tidak hanya mempengaruhi aktivitas pengendalian, tetapi juga dapat menunjukkan suatu kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan informasi dan komunikasi atau kegiatan pemantauan. Jadi pengendalian intern bukanlah suatu proses yang berurutan, dimana suatu komponen hanya mempengaruhi satu komponen berikutnya, akan tetapi merupakan

suatu proses interaksi antar tujuan-tujuan dimana hampir semua komponen dapat dan akan saling mempengaruhi antara komponen-komponen lainnya.

e. Pihak yang Bertanggung jawab

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Auditing (2014, hal. 181) menyatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen.
Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya.
2. Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal.
3. Auditor Intern.
Bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatan.
4. Personel lain entitas.
Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.
5. Auditor Independen.
Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit atau dewan komisaris.

6. Pihak luar lain.

Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur, seperti Bank Indonesia Bapepam.

f. Keterbatasan Pengendalian Intern

Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efektif dan efisien haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

Sistem pengendalian intern perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aktiva perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, dimana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang menyatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang begitu sempurna, termasuk sistem pengendalian intern yang dijalankan perusahaan. Terakhir, ukuran perusahaan juga akan dapat memicu keterbatasan pengendalian intern. Dalam perusahaan yang berskala kecil,

sebagai contoh, mungkin akan sangat sulit untuk menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pengecekan independen, mengingat satu karyawan mungkin saja dapat merangkap mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda sekaligus (Hery, 2013, hal. 102).

Menurut COSO (2013, hal. 9) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam *Internal Control Integrated Framework* sebagai berikut:

"The Framework recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity's objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of internal control can experience a failure. Limitations may result from the:

- 1) Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
- 2) Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
- 3) Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
- 4) Ability of management to override internal control.*
- 5) Ability of management, other personnel, and/ or third parties to circumvent controls through collusion.*
- 6) External events beyond the organization's control."*

Berdasarkan uraian COSO di atas, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.

g. Pendekatan terhadap Pengurangan Resiko Pengendalian Intern

Menurut Amin Widjaja (2013, hal. 252), ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko pengendalian intern, yaitu:

1. "Pendekatan Perintah: "Jangan Mencuri, Jika anda melakukannya dan kami menangkap anda, anda akan dipecat."
2. Pendekatan Pencegahan: Teliti kemungkinan adanya pencuri dengan cara (1) menggunakan pengujian latar belakang (verifikasi jabatan, catatan kriminal, pemeriksaan terhadap pemberian pinjaman dan referensi), (2) pengujian poligrafi, (3) pengujian psikologi atas kejujuran dan identitas.
3. Pendekatan Deteksi: Bentuk prosedur dan pengendalian akuntansi dan audit internal untuk memeriksa secara periodik sahnya transaksi dan untuk menegaskan keberadaan aktiva.
4. Pendekatan Observasi: Pantau tingkah laku karyawan, tingkat persediaan barang-barang yang berharga dan mudah dibawa, dan periksa paket-paket keluar.
5. Pendekatan Investigasi: Tindak lanjuti semua dugaan pencurian dan selisih kas, persediaan barang, peralatan, bahan baku, alat tulis kantor, untuk menentukan sifat dan tingkat kerugian serta pelaku kejahatan yang dicurigai.
6. Pendekatan Asuransi: Miliki jaminan asuransi pertanggungan yang cukup untuk melindungi perusahaan terhadap kerugian substansial (walaupun tidak mengurangi pencurian oleh karyawan, hal ini mengurangi beban bila kerugian terjadi).

Apabila pendekatan tersebut tidak berjalan. Mungkin masalahnya bukan lagi tipe klasik. Yang berubah saat ini dalam lingkungan kerja adalah bahwa para pekerja ingin dan akan sering meminta:

1. Lebih berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi tugas mereka.
2. Perlakuan yang wajar dan adil serta peluang untuk promosi.

3. Pekerjaan yang berarti dan berguna-bebas dari pekerjaan yang membosankan.
4. Lingkungan kerja yang sehat dan aman.
5. Dilibatkan dalam kelompok kerja.
6. Kepercayaan antar pribadi.
7. Penghargaan dan pengakuan.

3. Piutang

a. Pengertian Piutang

Piutang merupakan komponen aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan, karena merupakan aktiva perusahaan yang paling besar setelah kas. Piutang timbul akibat adanya penjualan jasa dan barang secara kredit, dan bisa juga melalui pemberian pinjaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 43 (2009, hal. 435-436), pengertian piutang adalah “jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha.”

Menurut Rudianto (2012, hal. 210) piutang adalah “klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu.”

Menurut Warren, *et al* (2015, hal. 448) piutang (*receivable*) mencakup “seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain.”

Jadi secara umum piutang timbul akibat adanya barang atau jasa secara kredit. Piutang juga dapat timbul dengan adanya pemberian pinjaman uang kepada individu, perusahaan, organisasi atau transaksi-transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang terhutang. Piutang dicatat pada laporan posisi keuangan dengan mendebet akun piutang usaha (*Account Receivable*) dan diklarifikasikan sebagai aset lancar.

b. Klasifikasi Piutang

Di dalam akuntansi, penggolongan atau klasifikasi piutang memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya penggolongan atau pengelompokan tersebut akan membawa pembaca laporan keuangan lebih memahami unsur-unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyatakan, menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain.

Walaupun terdapat begitu banyak jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan tetapi berdasarkan jenis dan asalnya. Menurut Rudianto (2012, hal. 211) piutang dalam perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. “Piutang usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dibebankan dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar.
2. Piutang Bukan Usaha, yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, yang termasuk dalam kelompok piutang bukan usaha adalah persekot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan atau barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap restitusi pajak, piutang deviden dan lain-lain.”

c. Metode Pencatatan Piutang

Menurut Mulyadi (2014, hal. 461), menyatakan bahwa “pencatatan piutang dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini:

- 1) Metode Konvensional
Dalam metode ini, *posting* ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal.
- 2) Metode *posting* langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang.
 - 1) Metode *posting* harian
 - 2) Metode *posting periodic*
- 3) Metode pencatatan piutang tanpa buku pembantu
Dalam metode pencatatan piutang ini, tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam

arsip faktur yang belum dibayar (*unpaid invoice file*). Arsip penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang.

- 4) Metode pencatatan dengan menggunakan komputer.
Metode pencatatan dengan menggunakan *batch system*, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting, setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Piutang

Menurut Bambang Riyanto (2010, hal. 85) menyebutkan bahwa:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang adalah sebagai berikut:

1. Volume Penjualan Kredit.
Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah piutang.
2. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit
Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.
3. Ketentuan dalam Pembatasan Kredit.
Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relative besar maka besarnya piutang juga semakin besar.
4. Kebijakan dalam Pengumpulan Piutang.
Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang dalam dua cara yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang menggunakan kebijaksanaanya secara pasif.
5. Kebiasaan Membayar dalam Pelanggan.

Semua piutang yang diperkirakan akan terealisasi menjadi kas dalam setahun di neraca disajikan dalam pada bagian aktiva lancar.”

e. Cadangan Kerugian Piutang

Cadangan kerugian piutang adalah cadangan kas yang digunakan untuk menutup piutang yang tidak dapat tertagih. Menurut Kieso (2008, hal. 350) menyatakan bahwa “Piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan ayat jurnal pencatatan yang tepat pada akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba.”

Tidak ada satupun ketentuan umum yang merupakan pedoman untuk menentukan kapan suatu piutang tak tertagih. Karena pada kenyataannya seorang *customer* gagal untuk membayar piutang sesuai kontrak atau perjanjian tidak berarti utang-utang tersebut tidak akan dapat tertagih. Bangkrutnya *customer* adalah salah satu petunjuk yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya sebagian/seluruh piutang. Petunjuk lainnya meliputi penutupan bisnis *customer* atau gagalnya upaya penagihan setelah dilakukan beberapa kali usaha.

Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pos piutang dalam laporan posisi keuangan. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian, dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban (*expense*), yaitu beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*) yang disajikan dalam

laporan laba rugi. Semua penghapusan ini harus dicatat dengan tepat dan teliti karena berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan.

4. Sistem Pengendalian Intern Piutang

a. Prinsip Pengendalian Intern atas Penagihan Piutang

Menurut Romney (2014, hal. 418), secara garis besar menyebutkan bahwa:

“Terdapat beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penagihan piutang, yaitu:

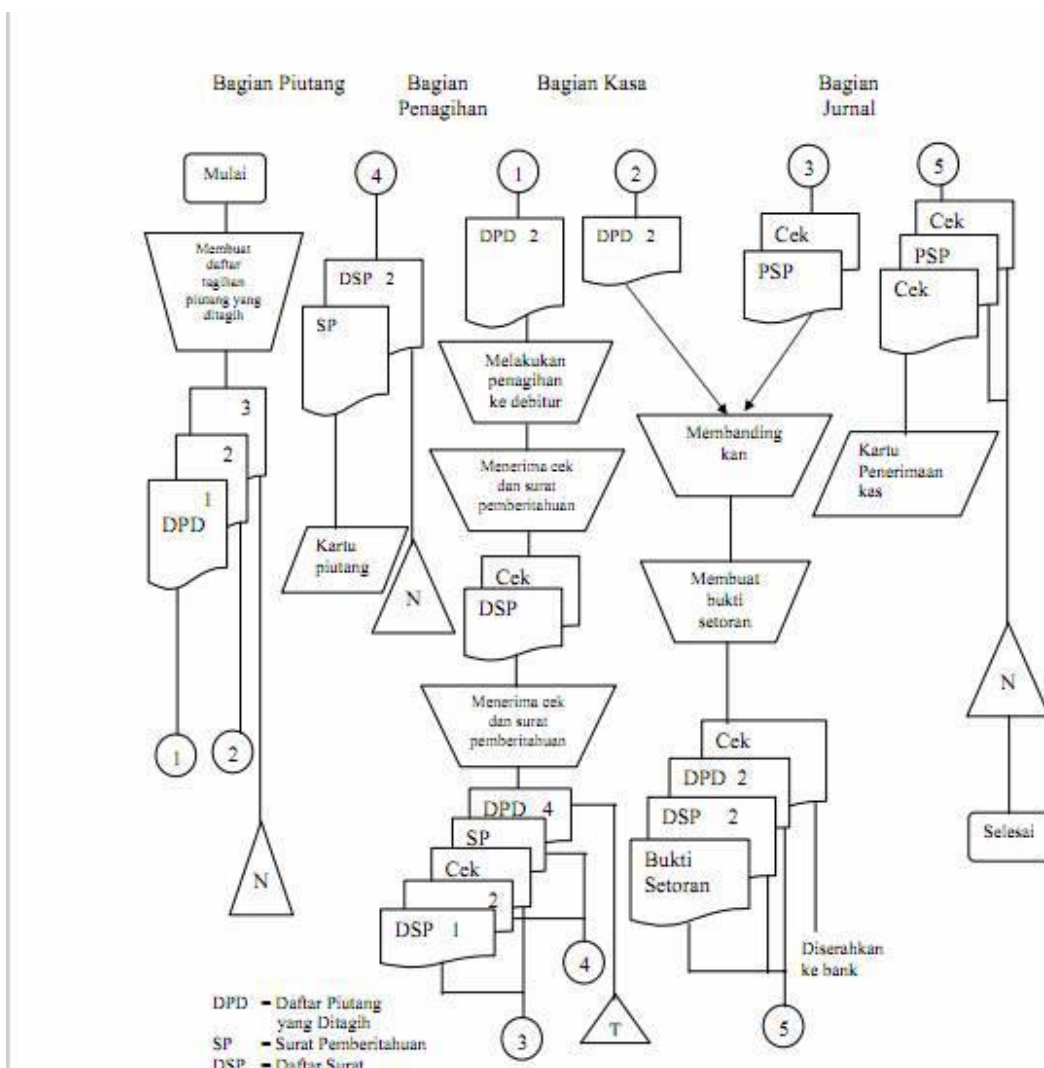
1. Pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman.
2. Rekonsialiasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan dan dokumen pengiriman.
3. Konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis.
4. Pembatasan akses ke data induk harga.
5. Pengendalian edit entri data.
6. Rekonsialiasi dokumen pengiriman (kartu pengambilan, *bill of lading* dan daftar pengepakan) untuk pesanan penjualan.
7. Pengendalian entri data.
8. Rekonsialiasi total *batch*.
9. Pengiriman laporan bulanan kepada pelanggan
10. Rekonsialiasi buku pembantu piutang di buku besar umum.
11. Pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entri pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan.
12. Konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen.”

b. Prosedur Penagihan Piutang.

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya.

Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh Mulyadi (2014, hal. 493) menyatakan bahwa:

1. “Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.
3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.
4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.
 - 4.1 Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.
 - 4.2 Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
5. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang debitur.
6. Bank perusahaan melakukan *clearing* atas cek tersebut ke bank debitur.”



Gambar II.1
Prosedur Penagihan Piutang

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena

kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus mitra binaan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan ke bagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi.

Menurut Krismiaji (2015, hal. 95) menyatakan bahwa:

“Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu:

1. Melalui Surat

Bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

2. Melalui Telepon

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar maka bagian kredit dapat menelpon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

3. Kunjungan Personal

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan sering kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

4. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.”

c. Fungsi Yang Terkait Dalam Penagihan Piutang

Menurut Mulyadi (2016, hal. 412) menyatakan bahwa :

1. “Fungsi Sekretariat.
Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau *remittance advice* melalui pos dan para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari para debitur dan fungsi ini berada di tangan bagian sekretariat.
2. Fungsi Penagihan.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi dan fungsi ini berada di tangan bagian penagihan.
3. Fungsi Kas.
Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagihan dan menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh dan fungsi ini berada di tangan bagian kas.
4. Fungsi Akuntansi.
Fungsi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang, dan fungsi ini berada di tangan bagian akuntansi.
5. Fungsi Pemeriksa Intern.
Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi, dan fungsi ini berada di tangan bagian pemeriksa intern.”

d. Dokumen Yang Terkait.

Menurut Mulyadi (2016, hal. 428) menyatakan bahwa terdapat dokumen yang digunakan dalam prosedur penagihan piutang, yakni:

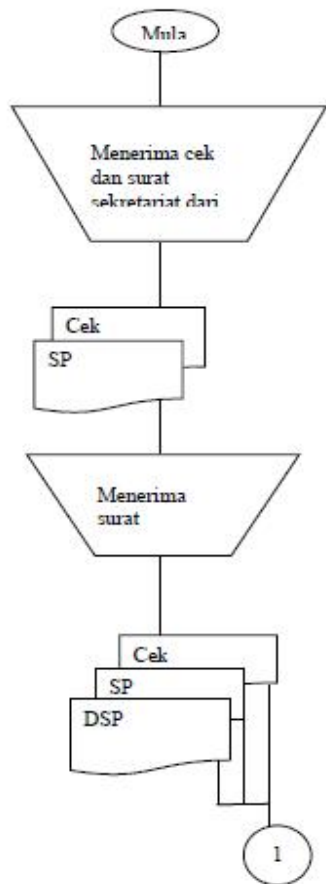
1. “Surat pemberitahuan yang menerima kas dari piutang.
Surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber pemberitahuan yang biasanya berupa tembusan bukti kas keluar.

2. Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas.
3. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas sebagai fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dan piutang ke dalam jurnal penerimaan kas.
4. Kwitansi sebagai dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang.”

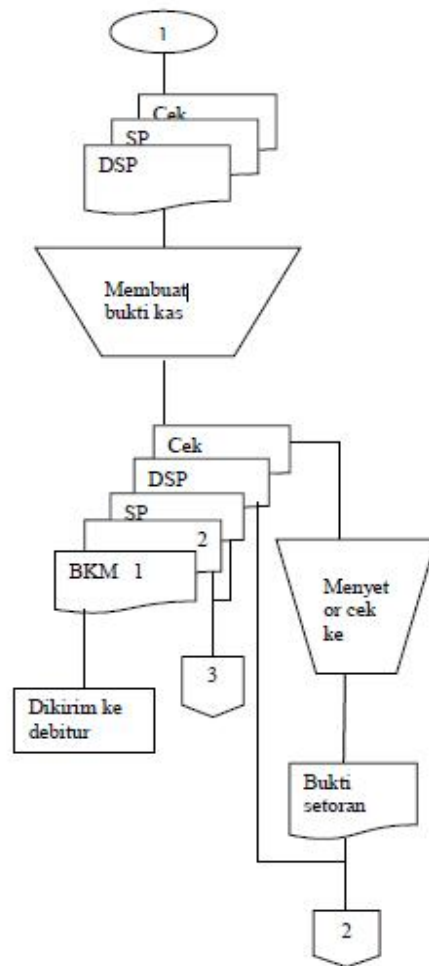
e. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas dari Piutang

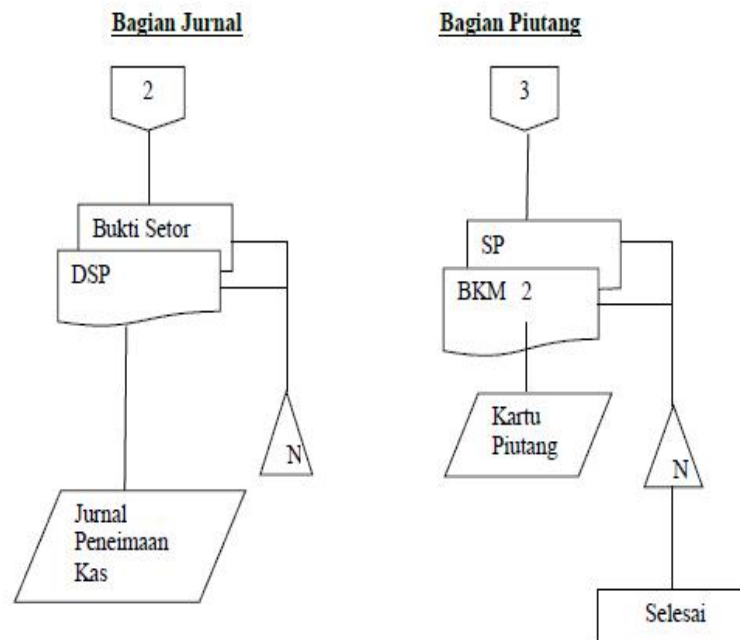
1. Bagian sekretariat menerima dokumen berupa cek dan surat pemberitahuan kepada debitur yang akan diproses sebagai daftar surat pemberitahuan.
2. Bagian kasa memproses dokumen cek daftar surat pemberitahuan untuk ditandatangani *endorsement* atas cek, kemudian membuat bukti kas masuk atas dokumen yang sudah ditandatangani, setelah ditandatangani dokumen cek telah disetor ke bank kemudian menerima buku setoran.
3. Bagian jurnal menerima dokumen berupa buku setoran dan daftar surat pemberitahuan yang diproses menjadi jurnal penerimaan kas.
4. Bagian Piutang menerima dokumen berupa surat pemberitahuan dan bukti kas masuk yang diproses menjadi kartu piutang.

Bagian Sekretariat



Bagian kasa





Gambar II.2 Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang

Keterangan

SP : Surat Pemberitahuan

DSP : Daftar Surat Pemberitahuan

BKM : Bukti Kas Masuk

5. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dian Hartati (2009)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. SFI Medan	Pengendalian Intern, Piutang Usaha	Lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan terhadap piutang usaha telah efektif. Sedangkan penentuan resiko dan aktivitas pengendalian piutang usaha kurang efektif.
2	Yahdi Furqon Busnia (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Pertamina PKBL.	Sistem Pengendalian Internal, Piutang Usaha, COSO	Sistem informasi akuntansi piutang yang diterapkan oleh PT. Pertamina PKBL sudah cukup baik karena didukung oleh sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi dan bersifat <i>online</i> dan bersinergi. Di samping itu, dalam sistem pemberian pinjaman kepada mitra binaan sudah terdapat adanya prosedur-prosedur operasional piutang yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana atas keterlambatan laporan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan program kemitraan pada PT. Telkom Cabang Palu sudah cukup baik, namun kurang baik dalam proses pelaksanaannya.
3	Putri Yati	Analisis Penerapan Sistem	Pengendalian intern, Kas dan	Sistem Pengendalian Intern pada PT. Taspen (Persero)

	(2016)	Pengendalian Intern Kas dan Setara Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU Medan.	Setara Kas	KCU Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat adanya rangkap tugas fungsi pelaksanaan umum dengan fungsi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
--	--------	---	------------	--

B. Kerangka Berpikir

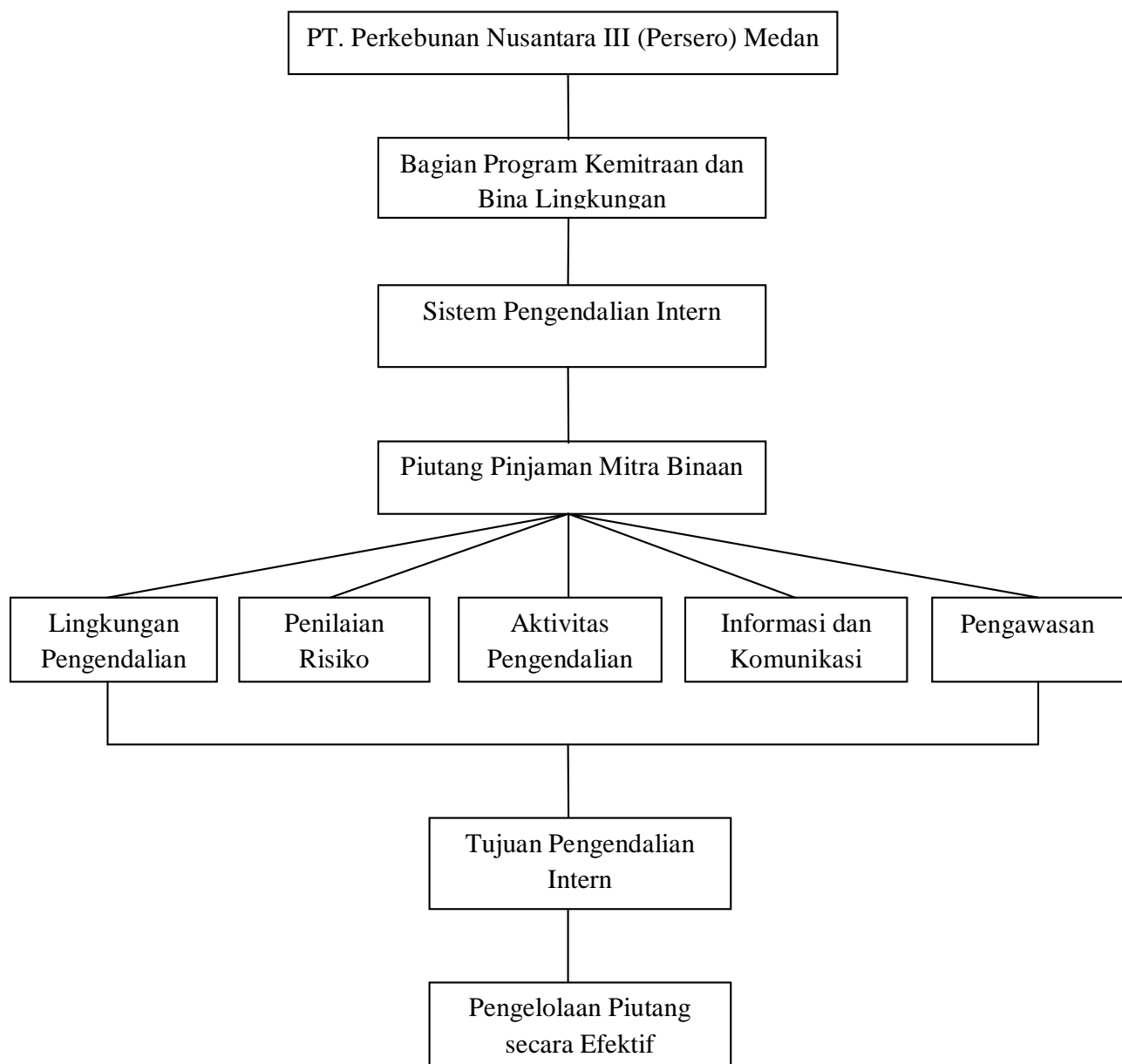
Sistem pengendalian intern merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkoordinasikan untuk menjaga aset perusahaan, mengecek laporan/data akuntansi dan sebagai motivasi agar dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian intern yaitu meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan manajemen piutang, resiko kegagalan menagih piutang merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian intern untuk menilai pelaksanaan pengawasan intern serta mengikuti kebijakan manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan gambar kerangka berfikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern dalam pemberian modal kerja kepada mitra binaan harus memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Unsur-unsur ini sudah baku ditetapkan pada *Commitee OF Sponsoring Organization Of The Treadway Commission* (COSO). Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijaksanaan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen perusahaan, direktur dan mitra

binaan serta pemilik suatu satuan terhadap pengendalian atas satuan usaha. Penerapan risiko oleh manajemen adalah bagian dari penerapan dan pengoperasian pengendalian intern untuk meminimalkan risiko dengan mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasi, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi. Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dalam mengatasi risiko pengendalian telah dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Informasi dan komunikasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Pemantauan berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

Berikut adalah kerangka berfikir dalam menjelaskan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar II.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dimana data yang dikumpulkan, kemudian disusun, diklasifikasikan, ditafsirkan, diinterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang sebenarnya mengenai pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif.

B. Definisi Operasional

Sistem pengendalian intern piutang merupakan suatu proses aktivitas atau kegiatan membandingkan kinerja yang sebenarnya dan seharusnya atau yang direncanakan mengenai pemberian pinjaman modal kerja dan penagihan piutang. Tujuan dari sistem ini adalah kebijakan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa telah diakui pengukuran pengendalian intern menggunakan unsur-unsur pengendalian COSO yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Komponen ini meliputi sikap manajemen disemua tingkat terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan

dan filosofi manajemen. Lingkungan pengendalian merupakan hal dasar bagi komponen COSO. Dimana manajemen harus paham pentingnya pengendalian intern.

2. Penilaian Risiko.

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang berkembang. Penilaian risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Penilaian risiko mencakup penentuan risiko disemua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.

3. Aktivitas pengendalian.

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggungjawab dan wewenang. Pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi merupakan kerangka bagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

4. Informasi dan komunikasi

Komponen ini merupakan tugas penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya.

5. Pengawasan.

Aktivitas pengawasan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian intern secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada di dalam perusahaan.

Untuk mengetahui pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif pada program kemitraan dan bina lingkungan dilakukan wawancara dengan menggunakan daftar wawancara yang berisikan kisi-kisi sebagai berikut:

Tabel III.2
Kisi-kisi wawancara

No	Variabel	No Item	Total	
1	Sistem Pengendalian Intern Piutang	Lingkungan pengendalian	1,2,3,4,5,6,7	7
		Penilaian Risiko	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9
		Aktivitas Pengendalian	1,2,3	3
		Informasi dan Komunikasi	1,2,3,4,5,6	6
		Pengawasan	1,2	2
	Total		27	

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan pada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang beralamat di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan Telp. +6261 8452244, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728.

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019. Jadwal/skedul dalam melakukan penelitian ini adalah:

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2018								2019												
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul				■																	
2	Pencarian Data				■	■																
3	Penulisan Proposal				■	■	■															
4	Bimbingan Proposal				■	■	■	■														
5	Seminar Proposal										■											
6	Analisis Data											■	■	■								
7	Penulisan Skripsi												■	■	■	■	■					
8	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■					
9	Sidang Meja Hijau																			■		

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat dihitung dengan angka melainkan data yang berupa deskriptif seperti struktur organisasi, dan *job description*. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung dengan menggunakan angka, yang datanya diperoleh langsung dari perusahaan berupa dokumen laporan keuangan, yang terdiri dari laporan program kemitraan dan bina lingkungan dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh penulis langsung dari perusahaan seperti laporan keuangan. Sedangkan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan *job description*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar, Juliandi, dkk (2015, hal. 65) menyatakan bahwa “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian.”

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang akan diolah, dianalisis, dan diuji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Azuar, Juliandi, dkk (2015, hal. 65) menyatakan bahwa “Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.”

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu penulis melakukan komunikasi langsung berupa tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan di program kemitraan dan bina lingkungan yaitu bagian keuangan.

2. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan piutang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dan dibandingkan dengan literature serta dianalisa kemudian diuraikan secara rinci untuk mencari penyelesaiannya.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016, hal. 63).

Langkah – langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diperoleh penulis melalui dokumentasi yang berkaitan dengan piutang.
2. Melakukan proses wawancara dengan pihak yang bersangkutan serta mendalami konsep-konsep mengenai pengendalian intern atas piutang.
3. Menyajikan teori-teori tentang sistem pengendalian intern, yaitu penulis mengumpulkan teori-teori tentang sistem pengendalian intern dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan skripsi.
4. Menguji data-data dokumentasi yang ada di perusahaan dengan teori-teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern atas piutang. Kemudian

Penulis membandingkan teori-teori tersebut dengan pengaplikasian yang diterapkan oleh perusahaan

5. Menarik kesimpulan yaitu setelah mendapatkan hasil tersebut, penulis akan menyimpulkan isi data-data yang penulis dapat dari perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh unit PKBL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

Piutang pinjaman mitra binaan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Penyisihan nilai piutang diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PKBL maka metode perhitungan yang dipilih

adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Dimana dalam kegiatannya perusahaan masih belum mengelola dengan baik piutangnya, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Data Piutang Pinjaman Mitra Binaan PTPN III (Persero) Medan
2013-2017

Tahun	Jumlah Mitra Binaan	Penyaluran Dana Mitra Binaan	Jumlah Piutang	Jumlah Piutang Tak Tertagih	Persentase Piutang Tak Tertagih
2013	5.904	184.428.552.113	72.321.336.813	31.341.415.696	43,34%
2014	6.468	204.513.552.113	73.928.448.315	32.358.558.504	43,77%
2015	6.818	218.053.552.113	61.564.544.380	5.267.304.566	8,56%
2016	7.325	239.363.552.113	70.898.390.444	13.890.150.575	19,60%
2017	7.681	254.723.552.113	73.127.959.431	15.907.294.000	21,75%

Sumber Data PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

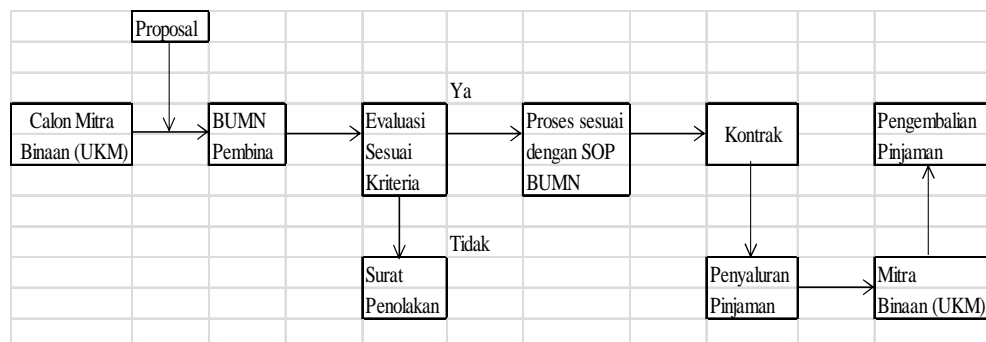
Dari tabel di atas jumlah mitra binaan sampai tahun 2017 berjumlah 7.681 mitra binaan dengan total penyaluran dana sejak digulirkannya program kemitraan sampai dengan tahun 2017 sebesar 254.723.552.113. Masih terdapatnya itikad yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk tidak membayar cicilan pinjaman sehingga terjadi tunggakan yang mengakibatkan adanya kenaikan kembali piutang tak tertagih pada tahun 2016 dan 2017.

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Modal Kerja Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

1) Tahap Pendahuluan.

Pada tahap ini calon mitra binaan yang mengajukan permohonan pinjaman modal kerja sebelum melakukan pengisian aplikasi formulir pinjaman modal kerja, maka seorang analis atau pihak yang berwenang harus menjelaskan kepada calon mitra binaan tentang apa dan bagaimana sektor-sektor kredit yang dilayani oleh pihak PKBL, khususnya dalam kredit produktif, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi sebagai calon mitra binaan, fitur-fitur kredit meliputi jumlah plafond dan jangka waktu, jasa administrasi dan lain sebagainya.

Berikut adalah mekanisme penyaluran dana program kemitraan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan:



Gambar IV.1
Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan Pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

2) Prosedur Penagihan Piutang

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melaksanakan penagihan piutang dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bagian piutang membuat daftar penagihan piutang rangkap tiga.
- b. Bagian piutang mengarsipkan daftar penagihan piutang rangkap satu sesuai nomor urut.
- c. Bagian piutang memberikan daftar penagihan piutang rangkap dua ke bagian penagihan, dan rangkap tiga ke bagian akuntansi.
- d. Bagian penagihan menerima daftar penagihan piutang serta melakukan penagihan kepada mitra binaan.
- e. Bagian penagihan memberikan cek dan surat pemberitahuan tersebut ke bagian akuntansi.
- f. Bagian akuntansi menyetorkan cek tersebut ke bank.
- g. Bagian akuntansi menerima bukti transaksi dari bank.
- h. Bagian akuntansi mencatat bukti transaksi bank pada laporan harian kas dan bank serta melampirkan bukti transaksi bank tersebut pada laporan harian kas dan bank kemudian menyerahkan kepada bagian keuangan untuk ditanda tangani.

3) Prosedur Pencatatan Piutang

Pencatatan piutang pinjaman mitra binaan mempunyai hubungan yang erat dengan prosedur pemberian pinjaman modal kerja dan prosedur

penerimaan kas. Dasar yang digunakan oleh bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan piutang mitra binaan adalah kwitansi penerimaan kas dari bagian penagihan. Setiap transaksi pemberian pinjaman modal kerja diinput ke komputer dan melakukan posting secara otomatis ke perkiraan piutang mitra binaan dan sub perkiraan (*sub ledger*) setiap mitra binaan. Dari *sub ledger* piutang mitra binaan dapat diketahui memuat seluruh jumlah piutang mitra binaan.

Setiap pembayaran piutang mitra yang dilakukan langsung oleh mitra binaan atau ditagih oleh bagian penagihan, langsung disetorkan kepada bagian keuangan setiap hari, dan bagian keuangan mengeluarkan kwitansi penerimaan rangkap tiga. Kwitansi penerimaan lembar pertama diberikan kepada mitra binaan, dan kwitansi penerimaan lembar kedua dikirim kepada bagian akuntansi, kwitansi lembar ketiga di arsip. Kemudian bagian akuntansi menjurnal pelunasan piutang mitra binaan, dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan piutang pinjaman mitra binaan dari bagian keuangan dan pembukuan.

4) Pengelolaan Piutang Secara Efektif

Pada hakekatnya piutang yang terjadi pada perusahaan akibat adanya transaksi pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan secara kredit, sehingga timbul piutang pinjaman mitra binaan. Dalam melakukan transaksi tersebut diperlukan mengevaluasi calon mitra binaan sesuai kriteria yang tercantum pada PER-02-MBU-07-2017.

Piutang yang dimiliki perusahaan adalah piutang pinjaman mitra binaan yang merupakan hasil dari pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada lebih dari satu mitra binaan yang berbeda. Salah satu yang masih dihadapi perusahaan yaitu masih terdapat itikad yang kurang terpuji dari para mitra binaan untuk membayar cicilan sehingga terjadi tunggakan dan belum membudayanya dikalangan mitra binaan untuk membayar angsuran cicilan melalui transfer bank. Mitra binaan lebih suka jika langsung ditagih ke tempat atau membayar langsung ke bagian PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengelolaan piutang yang tidak efektif, karena ketika mitra binaan ditagih atau membayar langsung ke bagian PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Medan) pada saat sudah jatuh tempo maka itu dapat menimbulkan *cash lapping* atau melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang.

3. Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Struktur pengendalian intern piutang pinjaman mitra binaan mencakup lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian intern dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif dapat dipenuhi. Adapun komponen-komponen dan unsur pengendalian intern pada program kemitraan dan bina lingkungan yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam perusahaan yang mempengaruhi kesadaran akan pentingnya pengendalian oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya sebagai dasar keefektifan sistem pengendalian intern piutang pinjaman mitra binaan.

Unsur-unsur lingkungan pengendalian:

- a. Integritas dan nilai-nilai, manajemen program kemitraan dan bina lingkungan setuju untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai yang telah ditetapkan perusahaan untuk menjaga efektivitas pengendalian intern piutang pinjaman mitra binaan.
- b. Komitmen terhadap kompetensi, para pegawai di bagian program kemitraan dan bina lingkungan setuju untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan dimasing-masing bidang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka.
- c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit, manajemen setuju untuk berpartisipasi terhadap kesadaran pengendalian intern piutang pinjaman mitra binaan pada program kemitraan dan bina lingkungan.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen, manajemen program kemitraan dan bina lingkungan setuju untuk melakukan pendekatan dalam mengambil memantau risiko khususnya pada piutang pinjaman mitra binaan.

- e. Struktur organisasi, struktur organisasi pada program kemitraan dan bina lingkungan, mereka sangat setuju untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab dengan cara semestinya.
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab, pada program kemitraan dan bina lingkungan pemberian pemahaman pegawai terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab, mereka sangat setuju untuk ditetapkan dalam perusahaan.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia, pelatihan dan evaluasi bagi pegawai di bagian program kemitraan dan bina lingkungan, mereka setuju dilakukan guna untuk meningkatkan keefektifan dalam pekerjaan yang telah dilakukan.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan yang berpedoman kepada kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan perusahaan.

Unsur-unsur penilaian risiko:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi, perubahan dalam lingkungan pekerjaan pada bagian program kemitraan dan bina lingkungan, mereka kurang setuju dapat mengakibatkan timbulnya risiko yang signifikan pada piutang pinjaman mitra binaan.

- b. Personel baru, adanya pegawai baru pada program kemitraan dan bina lingkungan, mereka kurang setuju dapat memiliki fokus yang berbeda atas pemahaman terhadap pengendalian intern.
- c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki, sistem informasi baru atau yang diperbaiki yang ada pada program kemitraan dan bina lingkungan, mereka kurang setuju dapat terjadinya risiko pada piutang pinjaman mitra binaan.
- d. Pertumbuhan yang pesat, banyaknya mitra binaan pada program kemitraan dan bina lingkungan, mereka setuju dapat memberikan adanya risiko yang signifikan pada piutang pinjaman mitra binaan.
- e. Teknologi baru, dengan adanya teknologi baru pada program kemitraan dan bina lingkungan, mereka setuju dapat mengubah risiko piutang pinjaman mitra binaan.
- f. Lini produk, produk atau aktivitas baru, mereka kurang setuju dengan masuknya aktivitas baru pada program kemitraan dan bina lingkungan dapat mendatangkan risiko pada piutang pinjaman mitra binaan.
- g. Restrukturisasi korporat, mereka kurang setuju untuk pengurangan pegawai pada program kemitraan dan bina lingkungan dapat mengubah risiko khususnya pada piutang pinjaman mitra binaan.
- h. Operasi luar negeri, mereka kurang setuju mata uang asing dapat berdampak pada piutang pinjaman mitra binaan.

- i. Penerbitan standar akuntansi baru, pemakaian prinsip akuntansi baru kurang setuju dapat berdampak terhadap resiko dalam pencatatan piutang pinjaman mitra binaan.

3) Aktivitas pengendalian.

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan telah efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur aktivitas pengendalian:

- a. Review kerja, mereka setuju kinerja pegawai pada program kemitraan dan bina lingkungan untuk selalu direview oleh pihak manajemen yang terkait.
- b. Pengendalian fisik, mereka kurang setuju jika setiap penerimaan kas dari piutang pinjaman mitra binaan terdapat otorisasi dari pihak yang berwenang.
- c. Pemisahan tugas, mereka kurang setuju jika adanya pemisahan tugas pada fungsi piutang dengan fungsi penagihan, fungsi akuntansi dengan fungsi penerimaan kas.

4) Informasi dan Komunikasi

Proses pengolahan data dan penyampaian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan dan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Unsur-unsur informasi dan komunikasi:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah, mereka setuju untuk mengetahui informasi mengenai kondisi calon mitra binaan, kondisi lokasi mitra binaan dan tentang segala bentuk jaminan yang diajukan oleh calon mitra binaan. Dan mereka setuju semua informasi transaksi yang sah tentang piutang pinjaman mitra binaan dicatat dan diidentifikasi
- b. Informasi transaksi piutang pinjaman mitra binaan, mereka setuju untuk dicatat dan diidentifikasi secara cukup rinci dan digolongkan semestinya serta dilaporkan pada saat yang tepat.
- c. Pencatatan nilai transaksi piutang pinjaman mitra binaan, mereka sangat setuju untuk dicatat sesuai dengan semestinya di dalam laporan keuangan.
- d. Pencatatan transaksi piutang pinjaman mitra binaan, mereka setuju dicatat sesuai dengan periode waktu terjadinya transaksi.
- e. Menyajikan dan mengungkapkan transaksi piutang pinjaman mitra binaan, mereka sangat setuju untuk disajikan dan diungkapkan di dalam laporan keuangan sesuai dengan semestinya.

5) Pengawasan

Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengendalian intern berjalan seperti yang diinginkan dan diperbaiki sesuai kebutuhan.

Pada program kemitraan dan bina lingkungan, mereka setuju jika perusahaan melakukan pemantauan terkait untuk piutang pinjaman mitra binaan yang dilakukan secara kontinyu serta adanya pengendalian dari perusahaan.

B. Pembahasan

Standar pelaksanaan sistem pengendalian intern piutang yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan penyusunan *Standar Operating Procedure* (SOP). Pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) istilah SOP tersebut digantikan dengan IK (Instruksi Kerja). Penyusunan IK dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas pengembangan dalam bentuk PKBL yaitu terkait kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparency*), mudah dijangkau (*accessibility*), dapat meminimalkan risiko, bermanfaat, aktivitas berkelanjutan (*sustainable*) serta struktur organisasi sederhana sehingga target pencapaian atau sasaran PKBL sesuai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip dasar kehati-hatian dan memenuhi asas pemberian pinjaman yang sehat.

Pada dasarnya tujuan penyusunan dan pelaksanaan IK terkait PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah sebagai kerangka acuan dalam mengelola program kerja dan kegiatan secara efektif, supaya tugas dan wewenang fungsi dapat tertata secara baik sesuai SK Menteri yang berlaku, kemudian sebagai alat dan monitoring serta ukuran kinerja dalam mengelola program dengan baik.

Mengenai pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif dalam hal ini mengacu kepada komponen pengendalian intern

menurut COSO. Dalam analisis penelitian ini, standar pelaksanaan pengendalian intern piutang yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

Sistem pengendalian intern pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum menerapkan unsur pengendalian intern secara menyeluruh. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bagian keuangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern piutang dalam meningkatkan pengelolaan piutang sudah dilakukan secara efektif pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap keseluruhan tindakan operasi perusahaan yang lebih difokuskan pada konsep pengendalian yang dilakukan. Manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan perusahaan untuk menjaga keefektifitas pengendalian intern. Selain itu, pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah mengkomunikasikan kode etik secara spesifik kepada karyawan mengenai kode etik terkait pengendalian intern yang mereka jalankan.

Manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menjunjung tinggi integritas dan kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan kompetensi di masing-masing bagian yang berbeda antara bagian urusan perencanaan & pembinaan dan

bagian urusan keuangan yang dijalankan berdasarkan struktur organisasi dan *job description* yang telah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan pengendalian pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah cukup efektif, karena struktur organisasi pada perusahaan telah menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dimana pihak manajemen juga memiliki kebijakan mengenai kedisiplinan dan kejujuran karyawan.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Manajemen perusahaan terus berupaya untuk meminimalisir risiko kredit, yang akan berpengaruh terhadap piutang pinjaman mitra binaan. Dalam hal ini, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai BUMN Pembina harus mengantisipasi adanya risiko ketika kredit sudah diberikan melalui program kemitraan.

Dalam penilaian risiko perusahaan harus mampu melakukan identifikasi, analisis manajemen risiko serta menangani risiko-risiko yang dihadapi terhadap masalah yang mungkin akan muncul, dengan kesiapan yang dimiliki oleh perusahaan, maka diharapkan risiko dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat menciptakan aktivitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian risiko pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dikatakan belum efektif, hal ini dapat

diketahui masih adanya mitra binaan yang kurang mampu dalam membayar pinjaman/modal kerja kepada perusahaan, sehingga menyebabkan jumlah piutang tak tertagih pada laporan keuangan perusahaan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.890.150.575 dan 2017 sebesar Rp. 15.907.294.000.

Aktivitas Pengendalian.

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian intern. Aktivitas-aktivitas ini meliputi review kerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan tugas. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara, PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum melaksanakan aktivitas pengendalian dengan efektif terhadap piutang pinjaman mitra binaan, masih adanya penggabungan fungsi piutang juga melaksanakan wewenang dan tanggung jawab fungsi penagihan, fungsi akuntansi juga melaksanakan wewenang dan tanggung jawab fungsi penerimaan kas. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa menurut COSO (Bodnar, 2008, hal. 239) bahwa pemisahan tugas yang dimaksud adalah pemisahan pembagian kerja. Maksudnya ialah pekerjaan yang berbeda harus dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. Adanya rangkap fungsi tugas di dalam perusahaan dapat menimbulkan kecurangan yang mengakibatkan perusahaan rugi.

Informasi dan Komunikasi

Informasi yang dibutuhkan pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif pada seluruh jajaran organisasi dan seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Pegawai harus paham peran mereka dalam sistem pengendalian intern seperti juga hubungan kerja antar individu. Informasi dan komunikasi yang baik dihasilkan dari sistem tersebut berdampak pada kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang handal.

Informasi mengenai piutang usaha pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah berupa informasi dari setiap bagian yang membidangi piutang usaha, di antaranya:

- a. Informasi mengenai kondisi calon mitra binaan maupun mitra binaan saat ini. Informasi ini bertujuan apakah calon mitra binaan tersebut layak diberi kredit atau tidak, layak diperpanjang atau tidak.
- b. Informasi mengenai kondisi lokasi yang diajukan saat ini. Informasi ini bertujuan untuk mengetahui pangsa pasar sebagai *partner* dalam pembiayaan dalam program kemitraan dan binaan lingkungan.
- c. Data tentang segala bentuk jaminan yang diajukan oleh calon mitra binaan kepada perusahaan. Informasi dan komunikasi tersebut digunakan untuk

mengantisipasi berbagai macam resiko yang terjadi apabila pencairan dana pinjaman sudah berlangsung sampai dengan pembayaran yang dilakukan.

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pengendalian intern menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan pencatatan yang telah diterapkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menyusun, menganalisa, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi tersebut serta bagaimana mengkomunikasikan dan memelihara pertanggung jawaban atas aset dan kewajiban yang terkait.

Dalam penggunaan informasi dan komunikasi pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam aktivitas piutang cukup efektif. Dimana laporan-laporan mengenai piutang sudah di input melalui komputerisasi dan dilaporkan untuk memberikan informasi pada laporan keuangan di bagian keuangan. Pencapaian pengendalian intern yang cukup efektif pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang disusun secara periodik akan menghasilkan hasil yang baik. Komunikasi yang berupa tindakan maupun lisan terutama yang berhubungan dengan proses penghimpunan sudah berjalan cukup baik, sehingga mempermudah pengendalian intern perusahaan.

Pengawasan

Manajemen PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menggariskan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing personilnya secara jelas. Kelancaran piutang menjadi tanggung jawab bagi personil bagian piutang, karena setiap personil mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sudah

di tentukan oleh bagian manajemen perusahaan. Pada PKBL di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan juga mempunyai tim auditor independen yang mempunyai tugas memeriksa segala bentuk transaksi, terutama dalam hal yang menyangkut laporan keuangan dan diperiksa dalam satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tim auditor PT. Pekebunan Nusantara III (Persero) Medan masih belum efektif, karena masih terdapatnya peningkatan piutang tak tertagih yang menjadi tanggung jawab divisi yang terkait. Hal tersebut bertentangan dengan teori Sukrisno (2011:100) “pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kerja pengendalian sepanjang tahun”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pengendalian intern piutang pinjaman mitra binaan yang dimiliki oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum efektif, yaitu mencakup komponen penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan pengawasan.
2. Sistem pengendalian intern piutang belum dapat meningkatkan pengelolaan piutang secara efektif. Pertama, bisa dilihat dari komponen penilaian risiko karena masih adanya mitra binaan yang kurang mampu dalam membayar pinjaman/modal kerja kepada perusahaan sehingga terjadinya peningkatan kembali piutang tak tertagih pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.890.150.575 dan 2017 sebesar Rp. 15.907.294.000. Kedua, masih belum efektifnya pada aktivitas pengendalian yaitu adanya penggabungan fungsi piutang dengan fungsi penagihan, fungsi akuntansi dengan fungsi penerimaan kas. Dan terakhir, karena masih terjadinya peningkatan kembali piutang tak tertagih pada tahun 2016 dan 2017 yang menjadi tanggung jawab terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan masih belum efektif.

B. Saran

1. Sebaiknya perusahaan sebelum melakukan kegiatan penyerahan dana kemitraan, mitra binaan terlebih dahulu diberikan pelatihan manajemen dasar bagi para mitra binaan agar mereka mampu dalam membayar pinjaman/modal kerja kepada perusahaan.
2. Sebaiknya perusahaan melakukan rotasi kerja secara berkala sehingga dengan adanya rotasi kerja akan mengurangi risiko penyelewengan dalam bekerja, selain itu juga merupakan tindakan untuk menilai apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.
3. Sebaiknya perusahaan menempatkan petugas yang berwenang untuk memverifikasi intern pada komponen pengawasan, dalam hal ini adalah internal auditor untuk melakukan pemantauan dan pengendalian intern secara khusus terkait piutang pinjaman mitra binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono Jusup. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Amin Widjaja. (2013). *Corporate Fraud dan Internal Control*, Edisi Keempat, Jakarta: Harvarindo.
- Azhar Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Lingga Jaya.
- Azuar Juliandi, Irfan, dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.
- Bambang Riyanto. (2010). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Edisi 4. BPFE: Yogyakarta.
- Bodnar, (2008). *Accounting Information System*. (Terjemahan oleh Deedy Jacobus), New York: Prentice Hall Inc.
- BUMN (2003). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Keputusan 236/MBU/2003, Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*.
- Carl S, Warren *et al.* (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Donal E. Kieso, dkk. (2008). *Akuntansi Intermediate*, Edisi ke Dua Belas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Ginjar Ma'ruffi (2016), *Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada PT. Indostar Sukses Motor*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Jakarta: Grasindo.
- <http://www.ptpn3.co.id/> Diakses 03 Desember 2018
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> Diakses 11 Desember 2018
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 43: Akuntansi Anjak Piutang*. Jakarta : Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), *Standar Profesional Akuntan Publik, Per 1 Maret 2011*, Jakarta : Salemba Empat.

- Iwan Setiawan. (2010). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate accounting)*, Buku Satu, Bandung: Refika Aditama.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems*, Edisi 13, Prentice Hall.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2014). *Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2016). *Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nenti Awarani, (2016), Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rini Agustina, (2018), Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Pada PT. Barata Indonesia (Persero) Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rudianto. (2012). *Akuntansi Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Valery G. Kumaat. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Waren Reeve Fees. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Yahdi Furqon Busnia, Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Pertamina PKBL. *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.